

Peranan Pemerintah Desa Bulutellue dalam Memberdayakan Masyarakat di Era Otonomi Daerah

Abdul Rahman

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Informasi Artikel:

Received: 13 Juli 2023, Accepted: 25 Juli 2023, Published: 01 Agustus 2023

Abstract

With the birth of Law No. 32 of 2004 on regional autonomy and Government Regulation No. 72 of 2005 on the village provides an opportunity to villagers to control and manage his own household, with the requirements mandated by the village government held to the principles of democracy, the role of and the community, equality, justice, and considering the potential and diversity of the region. The community has a central enough role to determine policy options that suit the needs and aspirations. But in reality, the village government has not been very instrumental in empowering potential contained in its citizens. Therefore in this study will be examined how the government's efforts in empowering rural communities. The purpose of this study was to determine and analyze the role of government in the village community as well as reviewing empowering driving and inhibiting factors in empowering people in the Bulutellue Village, Bulupoddo District of Sinjai Regency. Result this study is expected to benefit both theoretically and in practice both for the residents in Bulutellue Village, Ponre District of Sinjai Regency in particular and society in general. Result This study is classified as a descriptive qualitative research. With this approach the researcher to explore the nature of information about government's role in the rural village. The main data sources are the words and actions of key respondents sampled in this study. Techniques in exploring the data is through observation, interviews, and research dokumentation. Result of three main elements which include community development, community service and community development in the Bulutellue Village shows that the government has managed to build communication so that people can actively participate in the empowerment of the village, although recognized by the government of the village that there are factors that inhibit and promote community empowerment efforts.

Keywords: Development, Empowerment, Local Government, Society

1. Pendahuluan

Mengamati hasil-hasil pembangunan ekonomi dari banyak negara dan dengan memperhitungkan banyaknya teori-teori tentang ekonomi pembangunan, Gerald Meijer dan mungkin pula ahli lain masih bertanya: mengapa cerita keberhasilan dari rencana pembangunan sedikit sekali dibanding dengan cerita kegagalannya. Ia menyebutkan tiga kelemahan pokok yang menyebabkan kegagalan rencana pembangunan yaitu (a) tahap rencana dan pengawasan saksama tidak mendapat cukup perhatian dibandingkan dengan perhatian terhadap proses

perencanaan itu sendiri, (b) rumus perencanaan lebih banyak ditekankan pada model makro agak melupakan segi mikro ekonomi seperti analisis proyek, (c) perencanaan terlalu ditekankan pada aspek kuantitatif yang bersifat ekonomi dan melupakan faktor-faktor yang belum terungkap dan faktor-faktor non-ekonomi dalam proses pembangunan (Wijaya, 1988).

Yang dimaksud oleh Meijer adalah masalah keseimbangan dalam kebijaksanaan pembangunan, antara perencanaan dan pelaksanaan, antara sasaran yang luas dan target khusus, antara pengarah faktor-faktor ekonomi dan pembinaan faktor-faktor non ekonomi. Melupakan faktor yang satu dapat melemahkan faktor yang lain. Dikatakannya lebih lanjut bahwa hubungan fungsional antara faktor-faktor ekonomi dan ekonomi secara kuantitatif harus diperjelas, jika pembuat kebijakan ingin menentukan apakah akan digunakan insentif ekonomi atau psikologi, ataukah struktur organisasi, atau pengaruh sosial, ataukah faktor-faktor lain yang menghubungkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dengan perkataan lain, ia menyarankan adanya kebijakan dengan wawasan lebih luas dan perhitungan yang tajam pada faktor-faktor sosial ekonomi politik yang sangat mempengaruhi pembangunan (Nasdian, 2015).

Harus diakui bahwa dalam prakteknya di banyak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan ekonomi yang terjadi masih jauh menyimpang dari pola yang dicita-citakan. Pembangunan yang terjadi telah menciptakan jurang pendapatan yang bertambah lebar di antara berbagai golongan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat pada kehidupan dan tingkat kesejahteraan buruh. Keberpihakan pemerintah terkesan lebih berpihak melindungi pengusaha atau perusahaan daripada memperjuangkan nasib buruh, dan menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kesejahteraan buruh yang belum merata, sepeerti masih terdapatnya buruh yang belum dibayarkan Tunjangan Hari Raya yang sesuai aturan, jaminan kesehatan yang belum maksimal serta beragam persoalan sosial ekonomi buruh yang saling berkelindan (Yamin, 2023). Dalam hal sektor pembangunan perdesaan, pertumbuhan pembangunan infrastruktur mendasar yang belum merata, menyebabkan masih banyaknya desa atau daerah-daerah tertinggal. Kondisi ini ditandai dengan minimnya infrastruktur desa, baik prasarana jalan, fasilitas pelayanan umum, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi yang mengakibatkan aktifitas sosial ekonomi rendah, banyak desa ditinggalkan penduduknya bermigrasi ke kota. Terdapat 4.982 desa sangat tertinggal di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut setara dengan 6,65% dari total desa yang memiliki status Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 74.955 desa (Sarnita, 2022).

Masih dijumpainya ketidakmerataan pembangunan di wilayah perdesaan tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Republik Indonesia, yang mana hal tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sedikitnya ada dua alasan mengapa masalah pemberdayaan masyarakat desa masih relevan untuk dibahas. *Pertama*, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara Indonesia masih didominasi oleh daerah perdesaan. Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Benar bahwa di beberapa daerah ciri pedesaan itu susut perlahan bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi, akan tetapi itu tidak berarti hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota (Usman, 2010).

Kedua, sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di perdesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur perdesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat

miskin. Kondisi mereka sungguh memprihatinkan antara lain ditandai oleh kekurangan nutrisi, tingkat pendidikan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, dan rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari (Mudana, I, 2015).

Realitas kehidupan masyarakat desa yang terbelang jauh dari kata kesejahteraan menjadi pemacu agar kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi upaya untuk memberdayakan mereka sehingga memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi. Nampaknya bukan hal yang berlebihan jika dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang sesungguhnya berada di desa. Urbanisasi dengan segala dimensinya bukan menjadi jalan penyelesaian. Pernyataan ini sesungguhnya bukan untuk menafikkan pembangunan di wilayah perkotaan, melainkan ingin memberi penekanan bahwa akses masyarakat desa pada sumber-sumber ekonomi hingga saat ini masih dalam kondisi yang mencemaskan (Soetomo, 2018).

Dalam rangka mengurangi keterbelakangan di daerah perdesaan, maka telah muncul gagasan pembangunan berbasis pemberdayaan (Deswimar, 2014). Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat (Frank, 1984). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia di perdesaan, penciptaan peluang berusaha yang sesuai kehendak masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh, dan masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat (Zubaedi, 2007). Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam penergitan yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional (Agustana, 2020).

Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketahanan nasional di wilayah perdesaan, termasuk di wilayah Desa Bulutellue diupayakan melalui pemberdayaan sumber daya desa yang meliputi, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan sampai pada masyarakat umum. Saat ini isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan di Desa Bulutellue ialah masih belum memadainya kualitas SDM dan tenaga kerja dalam hal penguasaan teknologi informasi, masih rendahnya pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas dan infrastruktur ekonomi, tingginya resiko kebakaran lahan, kenakalan remaja yang dapat berujung pada perbuatan kriminal, maupun aktivitas mata pencaharian yang mengancam keberlanjutan ekologi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan merupakan tanggung jawab secara kolektif antara masyarakat dengan pemerintah desa. Namun demikian, realitas yang ada di lapangan masih dijumpai adanya masyarakat yang lebih menaruh harapan kepada pemerintah untuk mengurus kesejahteraan mereka. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari karakter dan mental masyarakat desa yang terkadang

apatis, pasrah terhadap nasib, dan motif berprestasi masih rendah karena masih terjebak pada pola perilaku subsistensi. Hal ini tentu menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah desa, terutama di era otonomi daerah, yang mana pemerintah desa telah diberikan kewenangan dan dana desa untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di desanya. Fenomena ini tentunya menarik untuk ditelaah lebih lanjut dengan menempatkan Desa Bulutellue sebagai sasaran penelitian. Adapun fokus utama penelitian ini ialah menyoroti tentang peran pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia. Sebab, program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. Lantas, apa yang dimaksud pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Maryani & Nainggolan, 2019).

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan. Dalam kerangka inilah, upaya memberdayakan masyarakat sedari awal haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah (Theresia, 2014).

Pemberdayaan adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dalam berbagai bidang pelayanan masyarakat dewasa ini, penggunaan istilah pemberdayaan kerap digunakan. Namun dalam prakteknya seringkali lupa akan makna hakiki “pemberdayaan”. Pemberdayaan, merupakan terjemahan dari kata , *empowerment* , berasal dari bahasa latin ‘*potere*’ ” yang artinya memampukan . Ada 3 makna kata “empowerment” dalam the on-line free dictionary, yaitu (1) *the giving or delegation of power or authority; authorization;* (2) *the giving of an ability; enablement or permission.* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung beberapa makna yaitu (1) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; (2) kekuatan; tenaga yg menyebabkan sesuatu bergerak; (3) akal; ikhtiar; upaya. Dari uraian tersebut, pemberdayaan merujuk pada menjadikan pihak yang diberdayakan mampu bertindak oleh karena kekuatan dan energy yang dimilikinya dihasilkan dari suatu pemikiran, ikhtiar dan akal (“sehat”). Umumnya pemberdayaan berbicara dua hal pokok yaitu memberi dan menerima kekuasaan atau wewenang. Ada pihak yang memberdayakan dan ada pihak yang diberdayakan. Pemberdayaan dapat pula ditinjau sebagai proses maupun hasil (Perkins, Zimmerman, 1995). Ditinjau dari proses, pemberdayaan menunjukkan keterlibatan pihak yang diberdayakan dalam setiap kegiatan, dalam pengambilan keputusan maupun dalam kepemimpinan. Ditinjau dari hasil, pemberdayaan menghasilkan akal, pikiran dan ikhtiar sehingga mampu mengambil keputusan oleh karena dorongan yang kuat untuk bertindak. Pemberdayaan menunjukkan keterlibatan pihak yang diberdayakan; terbangun pikiran, akal dan ikhtiar; ada pengambilan keputusan serta ada tindakan nyata oleh dan untuk diri orang yang diberdayakan.

2.2 Otonomi Daerah

Dalam otonomi daerah, visi pemerintah daerah dalam era desentralisasi pertama sekali bukanlah mengisi kas pemerintah daerah sebanyak-banyaknya, namun berusaha menciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat untuk berusaha dan membangun dirinya secara otonom agar tercipta kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki perekonomian daerah. Penyelenggaraan pemerintahan selalu terkait dengan sejarah dan situasi sosial para penguasa dalam menata masyarakat dan lingkungannya. Belum mantapnya sistem pemerintahan, lemahnya dukungan aparat, ikut menggoyahkan sendi-sendi pelayanan kebutuhan hidup masyarakat. Sistem pemerintahan dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, telah mengalami perubahan yakni dari pemerintahan sentralistik ke desentralistik (Lay, 2006).

Perubahan ini dikaitkan dengan situasi dan kondisi sosial yang secara fenomenal terjadi dalam penyelenggaraan berpemerintahan. Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan mengalami berbagai konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, kepentingan penguasa dengan kepentingan rakyat. Konflik berlangsung dari masa ke masa antara pemerintah dan penguasa yang melayani berbagai kepentingan, dengan masyarakat sebagai pengguna jasa yang menuntut diberikan pelayanan. Pemerintahan desentralistik merupakan suatu solusi untuk menjawab kebutuhan otonomi daerah secara lengkap mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong pemikiran baru bagaimana menata kewenangan yang efisien dan efektif. Artinya, pemerintahan dapat diselenggarakan secara demokratis (Rachayu, 2019).

Konsep otonomi berasal dari dua kata, yaitu *auto* (sendiri) dan *nomous* (menyelenggarakan). Artinya, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Konsep otonomi ini merupakan gejala sosial karena keberadaannya dalam masyarakat. Dalam sistem individu, seseorang memiliki suatu hak yang disebut "*privacy*", dan pada suatu kelompok masyarakat, mempunyai hak yang disebut "*autonomy*", serta pada suatu bangsa ada hak yang dikenal "*sovereignty*". Setiap orang memiliki hak pribadi dalam menentukan aspirasinya, seperti pribadi, daerah juga memiliki hak otonomi. Daerah sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ini disebut sebagai otonomi daerah (Napitupulu, 2018). Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pusat. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus (Winarno, 2007). Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran. Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses pembangunan, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerahnya. Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan

desentralisasi (Radiansyah, 2020).

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Adapun esensi dari otonomi daerah itu adalah komitmen untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya pada daerah (Rikza, 2022).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kondisi yang sebenarnya (Ikbar, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebab suatu gejala-gejala dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1991). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap informan kunci yang telah ditentukan sebelumnya serta wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan lain sebagai pelengkap data. Menurut Bogdan dan Guba penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Komara, 2014). Penelitian kualitatif pada mulanya banyak digunakan dalam bidang Sosiologi, Antropologi dan kemudian memasuki bidang psikologi, pendidikan, bahasa dan ilmu-ilmu sosial lainnya, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Rahman, 2022). Karena di dalam pengumpulan data lapangan metode ini memfokuskan kegiatan orang dalam berinteraksi dengan lingkungan kehidupan mereka, dan peneliti berusaha memakai bahasa dan tafsiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang diteliti dengan dunia sekitarnya. Adapun alasan peneliti memilih jenis metode kualitatif agar peneliti dapat lebih mudah mendapat informasi secara rinci tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Bulutellue.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya aparat Desa mempunyai fungsi (a) Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri (b) Menggerakkan partisipasi masyarakat (c) Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya (d) Keamanan dan ketertiban masyarakat (e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas maka seorang Kepala Desa harus mengusahakan (a) Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat (b) Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat (c) Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral (d) Terselenggaranya program yang berkelanjutan (e) Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja

Selain fungsi Kepala Desa yang telah dijelaskan di atas, Kepala Desa masih mempunyai

peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayahnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat Desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan tentang peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Bulutellue yang Secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Bulutellue “**Abdul Hamid**” beliau menyatakan: “Masyarakat di desa ini sangat antusias menyambut setiap ada kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada di daerah kami. Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya pembangunan di desa kami sangat bergantung kepada kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada Pembinaan di bidang ini adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama di kalangan pedagang kecil. Contoh para pengusaha untuk meningkatkan usahanya diberi pinjaman modal dengan bunga rendah dan bergulir untuk dipinjamkan selanjutnya ke kelompok lain. Kegiatan pembinaan ini disebut dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat desa (UDSP). Sebagian besar kegiatan ini telah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh PNPM mandiri dengan membuat program simpan pinjam perempuan maka tingkat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu pembinaan di bidang perkoperasian sudah mulai dilakukan oleh aparat desa dengan mengajak masyarakat untuk menyimpan dan menyalurkan dana bagi masyarakat lain yang membutuhkan.

4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Hukum dan Agama

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar masyarakat, terutama pemuda memiliki pemahaman tentang pentingnya untuk menghindari perbuatan melawan hukum. Pihak kepolisian dari Polsek Kecamatan Bulupoddo bersama aparat desa setiap bulan tejun ke

masyarakat dalam rangka membangun dialog demi tercegahnya aksi-aksi kriminal, kericuhan tingkat kampung, maupun kegiatan mengkomsumsi minuman keras. Selain itu, pihak kepolisian juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan mengaktifkan kegiatan ronda malam. Ronda malam bukan hanya ditujukan untuk mengatasi perbuatan kriminal, tetapi sebagai antisipasi dan pengawasan pada lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran, ataupun menjaga jangan sampai ada hewan ternak dari warga yang berkeliaran atau lepas kandang lantas merusak tanaman warga lain.

Dalam hal Pembinaan masyarakat pada bidang agama, Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan pemuda. Contohnya mengadakan pengajian setiap minggu serta kerja bakti untuk membersihkan tempat ibadah. Hal yang tidak kalah penting dalam pembinaan keagamaan ialah pembekalan ilmu agama yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Sebagai salah satunya lembaga keagamaan, Taman Pembelajaran al-Quran (TPA) menjadi harapan dan tumpuan masyarakat untuk memberikan bekal ilmu agama khususnya dalam membaca al-Quran. Untuk itu peran guru mengaji sangat penting keberadaannya dalam lingkungan masyarakat desa. Berkat upaya pemerintah desa dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, guru mengaji yang ada di Desa Bulutellue mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini pemberian dana insentif.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang agama tentu terkait pula dengan pemberdayaan pendidikan. Pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

4.3 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Pemerintah Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana system pengelolaan suatu program baik program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan,

kesehatan, sosial budaya dan ekonomi maupun program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan. Pembinaan yang paling giat dilakukan oleh Pemerintah Desa BulutelluE adalah pembinaan dalam kegiatan keagamaan, sosial budaya dan pembinaan kepada ibu-ibu PKK. Fasilitasi kegiatan ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan alat-alat seni dan ceramah agama yang biasanya didatangkan dari luar desa, sebagaimana yang disampaikan oleh H.Tansi, seorang tokoh agama di Desa BulutelluE. “Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pembersihan secara bergotong-royong di tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali silaturahmi dengan sesama warga, dan pengajian yang rutin diadakan setiap minggu yang disertai dengan ceramah agama biasanya banyak dihadiri oleh anak-anak muda. Mungkin tujuan dari pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda”. Selain itu pula bentuk nyata peranan aparatur pemerintah Desa BulutelluE adalah memberikan pembinaan dalam bidang kesehatan.

Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang kesehatan terbukti di setiap dusun yang ada di desa ini di adakan posyandu yang mana di tempat ini disetiap bulan di adakan penimbangan balita dan penyuluhan kepada ibu baik ibu-ibu menyusui, nifas, dan juga tempat pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini dan pemberian vitamin, imunisasi baik imunisasi campak, bcg, dpt, oleh tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan kader posyandu yang dipandu oleh tim penggerak PKK Desa (POKJA IV) dan juga di Desa BulutelluE ini telah dibangun PUSKESDES (Pusat Kesehatan Masyarakat Desa) tempat ini digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa secara gratis bagi yang memiliki kartu keluarga dan KTP. Apabila tidak menunjukkan kedua identitas tersebut maka pasien akan dikenakan biaya administrasi sebanyak Rp.5.000,- ini membuktikan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak kesehatan sangat erat demi terlaksananya tertib administrasi di bidang pemerintahan desa. Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Marlina Syam sebagai pengurus PKK, beliau mengatakan: “Pemberian sanksi administrasi bagi warga yang tidak memiliki KTP dan KK ketika ingin mendapatkan pengobatan gratis berupa biaya sebesar Rp.5.000 bukanlah bermaksud untuk memberatkan warga desa melainkan mengajak masyarakat untuk tertib administrasi. Itupun tidak semua warga dikenakan biaya jika tidak memiliki KTP dan KK, karena warga yang mendapat kartu JAMKESMAS dan JAMKESDA tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dan dibebaskan dari segala biaya serta dana yang terkumpul dari denda administrasi diserahkan kembali ke petugas kesehatan untuk di manfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Begitupula di Desa BulutelluE ini telah dibangun kerjasama antara bidan dan dukun dimana setiap ibu hamil yang akan melahirkan telah diberi pengertian dan pembinaan agar bila nanti melahirkan ibu hamil tersebut melaporkan kepada dukunnya dan dukun tersebut menyampaikan kepada bidan desa karena yang akan melayani persalinan adalah tenaga medis dan yang melaksanakan adat atau kebiasaan masyarakat adalah dukun. Jadi proses melahirkan ditangani oleh bidan dan prosesi jampi-jampi dilakukan oleh dukun tersebut. Ini juga membuktikan bahwa pemerintah desa sangat peduli bagaimana pentingnya kebersamaan dalam melaksanakan segala kegiatan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat dan di desa ini juga di adakan penyuluhan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang dilaksanakan oleh tim penggerak PPK Desa (POKJA IV) bekerjasama dengan bagian Sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, dimana dalam pembinaan ini masyarakat diajak untuk membuat jambang agar BAB pada tempatnya dan cuci tangan sebelum makan, makanan harus ditutup, bak mandi harus dibersihkan dan masalah kesehatan yang lain yang dapat merusak kesehatan

masyarakat.

4.4 Pemberdayaan Terkait dengan Pemuda

Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa BulutelluE Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan di bidang pertanian maka aparat pemerintah Desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Kondisi diatas sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua kelompok tani “Muhammad Arfah” dimana penulis menanyakan tentang bentuk pelayanan pemerintah desa dalam bidang pertanian. Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan oleh Muhammad Arfah: “Hasil panen gagal tidak bisa sepenuhnya disebabkan karena kesalahan petani, tetapi pemerintah desa harus juga bertanggung jawab terhadap kegagalan panen karena kurangnya perhatian untuk memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi panen yang gagal, karena itu dengan adanya upaya pemerintah desa untuk menghubungi dinas pertanian agar rutin memberikan penyuluhan dan informasi tentang tata cara bertani yang benar dan sebagainya dianggap sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami”. (20 Agustus 2015). Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat di Desa dapat dilihat pada pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa kepada masyarakat yang berkepentingan. Sehubungan dengan pelayanan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai ukuran untuk melihat efektivitasnya yaitu kesadaran dan kebijaksanaan oleh Kepala Desa serta aparat pemerintah Desa yang lain terhadap pelayanan masyarakat setempat. Sebagaimana halnya dengan pelayanan birokrasi pemerintah pada umumnya, setiap pelayanan harus melalui prosedur dan mekanismenya. Prosedur pelayanan masyarakat tersebut sangat terkait dengan fungsi Pemerintah Desa dalam mengembangkan organisasi pemerintahannya baik itu terhadap kegiatan administrasinya maupun dalam bidang pembangunan atau pelaksanaan pengawasan serta pembinaan terhadap masyarakat Desa. Salah satu upaya maksimal yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa BulutelluE adalah membuat kotak saran dalam rangka menampung berbagai aspirasi yang diletakkan di depan pintu kantor desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa BulutelluE “**Andi Haryanto**” menyatakan: “sebagai bentuk kepedulian kami akan berbagai permasalahan yang terjadi pada warga, kami menyediakan kotak saran untuk menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang mungkin malu atau enggan menyampaikan secara langsung berbagai kendala yang dihadapi. Meskipun demikian dalam berbagai kesempatan ketika ada rembug desa, saya selaku yang dipercayakan memimpin mereka menyampaikan bahwa semua saran dan aspirasi jika bernilai positif akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Sekalipun demikian upaya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat khususnya dari kelompok karang taruna menyatakan bahwa kadang-kadang yang cukup menyulitkan dalam pemberian pelayanan adalah perilaku aparat yang seringkali memilah-milah bahkan tidak memberikan toleransi terhadap persoalan masyarakat yang dihadapi. Bahkan terkadang proyek yang seharusnya dikerjakan oleh LKD malah diserahkan kepada orang lain yang memiliki kedekatan dengan kepala desa. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dianggap bisa memberikan kesenjangan antara warga yang satu dengan warga yang lain. Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan ketua karang taruna Desa BulutelluE Kecamatan Bulupoddo, “Asnawi” bahwa mereka bisa memahami bentuk perlakuan dalam pemberian pelayanan karena tidak semuanya langsung bisa dipenuhi, dalam arti mereka tetap bisa mentolerir dan memahami kebijakan-kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berikut ini adalah petikan hasil wawancara dengan **Ilham HS** sebagai berikut: “Sebagai ketua karang taruna di Desa BulutelluE, kami menganggap pelayanan pemerintah desa belumlah maksimal meskipun sebahagian besar masyarakat menganggap pemerintah desa telah berbuat yang terbaik untuk warganya. Pemerintah Desa terkadang masih diatur oleh pemerintah di atasnya untuk melakukan berbagai perbaikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, padahal kami menginginkan perbaikan sarana dan prasarana khususnya untuk kepentingan para pemuda yang didahulukan, tapi kami menyadari dan paham akan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Sejalan dengan pandangan ketua karang taruna, Kaur Pemerintahan Desa BulutelluE Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, yang diwawancarai memberikan alasan bahwa semua permintaan dan masukan dari warga masyarakat berusaha untuk dipenuhi namun semuanya harus berjalan sesuai proses yang telah ditetapkan. “Sebenarnya tidak ada istilah memilah-milah bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi tidak ditanggapi namun realisasi yang diharapkan dari pemerintah di atas kami belum menyetujui, jadi semuanya harus menunggu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalaupun ada perlakuan dari aparat desa yang dianggap diskriminatif atau membedakan pelayanan itu disebabkan karena terbatasnya staf Pemerintah Desa, sehingga kadang kurang memperhatikan masyarakat yang datang yang meminta pelayanan.

5. Kesimpulan

Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi tiga hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.

Daftar Pustaka

- Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial. *Locus Majalah Ilmiah FIA*, 12(1).
- Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41–52.
- Frank, A. G. (1984). *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Ikbar, Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Komara, E. (2014). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Lay, C. (2006). *Involusi Politik: Esei-Esei Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:

Deepublish.

- Mudana, I. W. (2015). *Sosiologi Antropologi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Napitupulu, H. C. (2018). *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Proses Legislasi Di Dalam Konstruksi Tripartit Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*. UAJY.
- Nasdian, F. T. (2015). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rachayu, K. (2019). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan. *Sosiohumaniora*, 21(1), 17–21.
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan good governance melalui kerangka otonomi daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 2(1), 80–93.
- Rahman, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 81–86.
- Sarnita, S. (2022). *Ada 4.982 Desa Sangat Tertinggal di Indonesia pada 2022*. Jakarta: DataIndonesia.id. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-4982-desasangat-tertinggal-di-indonesia-pada-2022>
- Soetomo. (2018). *Masalah Sosial, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Theresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, S. (2010). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, A. (1988). *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, B. (2007). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yamin, M. N. (2023). *Ekonomi Berkeadilan Masih Jauh dari Harapan Buruh*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Retrieved from <https://suaramuhammadiyah.id/2023/05/01/ekonomi-berkeadilan-masih-jauh-dari-harapan-buruh/>
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



